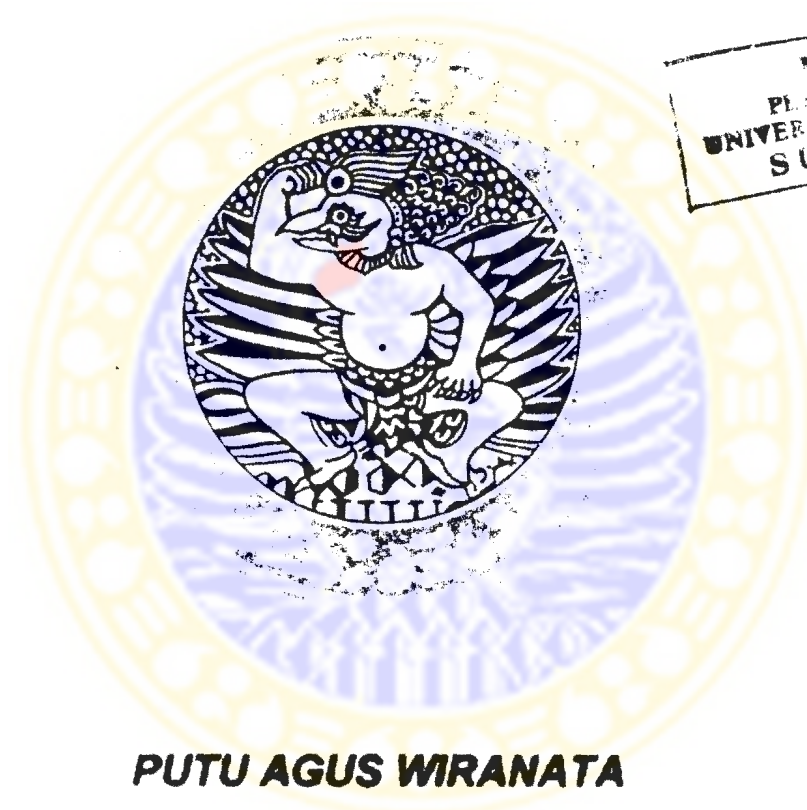


KIC
Per 02/01
Wir
P

SKRIPSI

**PERUBAHAN CORE BUSINESS EMITEN
DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL**



PUTU AGUS WIRANATA

039714505

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2001**

**PERUBAHAN CORE BUSINESS EMITEN
DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT - SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



M. Zaidun, S.H., M.Si.
NIP. 130517145



Penyusun,



Putu Agus Wiranata
NIM. 039714505

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2001**

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan yang telah dilakukan, antara lain :

1. **Mengenai prosedur hukum perubahan *core business*** ada tiga hal penting yang harus diperhatikan emiten antara lain mengenai keterbukaan informasi, studi kelayakan dan perubahan anggaran dasar. *Keterbukaan informasi* penting karena sebagai PT terbuka maka emiten harus benar-benar transparan kepada publik terhadap setiap perkembangan yang terjadi terhadap perseroan terutama atas setiap *corporate action* yang dilakukan emiten yang akan berpengaruh terhadap kepentingan publik yaitu pemodal, calon pemodal dan pihak lain yang berkepentingan dengan informasi tersebut. *Studi kelayakan* penting untuk menilai kesiapan emiten dalam rencana perubahan *core business*-nya termasuk dalam hal ini menilai resiko bisnis (untung-rugi) yang akan ditanggung emiten apabila perubahan *core business* tersebut dilaksanakan. *Perubahan anggaran dasar* penting karena anggaran dasar memuat tujuan pendirian perusahaan termasuk *core business* emiten. Apabila ada perubahan terhadap *core business* emiten maka otomatis anggaran dasar emiten harus dirubah. Selain tiga hal tersebut, tahapan lain yang perlu mendapat perhatian adalah tahapan pengalihan *core busniess* lama emiten. Pengalihan *core business* lama

emiten dilakukan apabila eksistensi *core business* lama tersebut diperlukan untuk tetap melindungi dan melayani kepentingan pihak-pihak yang bergantung kepada layanan *core business* tersebut. Tetapi tahapan ini tidak mutlak harus dilakukan dalam perubahan *core business* emiten. Khusus mengenai studi kelayakan, karena Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-05/PM/2000 tentang Peraturan Bapepam No.IX.E.2 : transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama yang mengatur masalah ini masih tergolong baru, tentang kekuatan hukum dan tanggung-gugat pihak penilai terhadap hasil penilaiannya masih belum secara jelas diatur. Hal ini bisa mengakibatkan studi kelayakan hanya merupakan suatu prosedur formal. Mengenai proses pengalihan *core business* lama yang tidak ditentukan kapan harus dilakukan, dalam hal ini akan menimbulkan problem tersendiri mengenai akibat hukumnya.

2. **Mengenai perubahan *core business* yang dilakukan PT ALL Tbk.** jelas bahwa telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum pasar modal dalam proses perubahan *core business*-nya. Hal ini terbukti dari kegagalan-kegagalan corporate action yang dilakukan PT ALL Tbk., seperti : ketidak-wajaran alasan pengalihan segmen usaha ke AIG Lippo Life, pernyataan-pernyataan baik direksi maupun komisaris dalam *publik expose* yang cenderung menimbulkan kesesatan kepada publik dan terakhir bahwa perubahan *core business* PT ALL Tbk. kurang memperhatikan aspek studi kelayakan. Sayangnya pihak Bapepam tidak menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap *corporate action* PT ALL Tbk. Bapepam hanya menjatuhkan sanksi administratif (denda) kepada

komisaris, direksi dan perseroan karena kurang hati-hati dalam memberikan pernyataan mengenai *corporate action*-nya.

3. **Perlindungan bagi pemodal terhadap perubahan *core business* emiten**
yang diatur UUPT dan UUPM masih dirasakan sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari : *pertama*, prosedur pengambilan keputusan RULBPS yang mengutamakan kuantitas suara dijadikan celah bagi emiten untuk mewujudkan rencananya; *kedua*, tuntutan baik secara litigasi maupun non litigasi kurang efektif karena syarat-syarat dalam tuntutan tersebut yang cenderung menguntungkan posisi emiten. Untuk perlindungan hukum pemodal hanya bisa mengandalkan pada prinsip keterbukaan yang disyaratkan UUPM terhadap setiap *corporate action* emiten. Hal ini-pun dengan catatan bahwa informasi tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan dampak positif dan negatif baik bagi emiten maupun pemodal.

2. Saran-saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang tercermin dari kesimpulan diatas, disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Terhadap pelaksanaan studi kelayakan dalam rangka proses perubahan *core business* emiten perlu kiranya dikeluarkan peraturan yang menjadikan hasil penilaian pihak independen mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menempatkan pihak independen tersebut sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Ini penting untuk memberikan perlindungan baik kepada pemodal, calon pemodal atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perubahan tersebut. **Konsekuensi terhadap status hukum pihak**

independen sebagai profesi penunjang pasar modal adalah adanya wewenang Bapepam mengawasi kinerja pihak independen tersebut sekaligus menjatuhkan sanksi apabila terjadi penyimpangan terhadap tugas profesi pihak independen tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi publik. Oleh karena itu, harus ada sebelum persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perubahan *core business*. Ini penting sebagai antisipasi apabila rencana perubahan *core business* tidak terealisasi emiten masih dapat menjalankan *core business* lamanya.

2. Pihak Bapepam selaku pengawas setiap kegiatan dipasar modal dimasa yang akan datang diharapkan lebih tegas menindak emiten baik yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar ketentuan hukum dibidang pasar modal seperti yang dilakukan PT ALL Tbk. Hal ini untuk memberikan preseden yang baik bagi penegakkan hukum dibidang pasar modal.
3. Pihak pembuat peraturan perundangan dalam rangka melindungi kepentingan pemodal terhadap *corporate action* emiten yang merugikan perlu mempertimbangkan untuk meninjau kembali ketentuan hukum baik dibidang perseroan terbatas atau pasar modal. Ketentuan hukum yang ada sekarang terkesan masih berpihak pada kepentingan emiten dan kurang memperhatikan kepentingan pemodal.